

KEBIJAKAN HUKUM PIDANA SANKSI KEBIRI KIMIA DITINJAU

DARI TUJUAN PEMIDANAAN DAN PERSPEKTIF HAM

SKRIPSI

Untuk Memenuhi sebagai Persyaratan
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum
Program Studi Ilmu Hukum



Disusun Oleh :
TRI AGENG ALIFI
NIM: 201610110311359

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MALANG

FAKULTAS HUKUM

2020

LEMBAR PERSETUJUAN

PENULISAN HUKUM

**KEBIJAKAN HUKUM PIDANA SANKSI KEBIRI KIMIA DITINJAU
DARI TUJUAN PEMIDANAAN DAN PERSPEKTIF HAM**

Disusun dan diajukan Oleh :

Tri Ageng Alifi

NIM : 201610110311359

Telah disetujui oleh Pembimbing untuk dilakukan
Ujian Skripsi

Pada tanggal : 05 Oktober 2020

Dosen Pembimbing

Pembimbing I

Dr. Tongat, S.H., M.Hum

Pembimbing II

Dr. Sidik Sunaryo, SH.M.Si.M.Hum.,MH.

Mengetahui

Dekan Fak. Hukum UMM

Dr. Tongat, S.H., M.Hum

SKRIPSI

Disusun oleh:

TRI AGENG ALIFI

201610110311359

Telah dipertahankan di depan Dewan Penguji

Pada, Jumat 23 Oktober 2020

dan dinyatakan memenuhi syarat sebagai kelengkapan

memperoleh gelar Sarjana Hukum

di Program Studi Ilmu Hukum Universitas Muhammadiyah Malang

SUSUNAN DEWAN PENGUJI

Ketua : Dr. Tongat, SH., M.Hum

Sekretaris : Dr. Sidik Sunaryo, SH., M.Si., M.Hum

Penguji I : Dr. Catur Wido Haruni, SH. M.Si., M.Hum

Penguji II : Ratri Novita Erdianti, SH., M.H

**KEBIJAKAN HUKUM PIDANA SANKSI KEBIRI KIMIA DITINJAU
DARI TUJUAN PEMIDANAAN DAN PERSPEKTIF HAM**

Diajukan Oleh:

TRI AGENG ALIFI

201610110311359

Telah dipertahankan di depan Dewan Penguji

Pada, Jumat 23 Oktober 2020

Pembimbing Utama,

Dr. Tongat, SH., M.Hum

Pembimbing Pendamping,

Dr. Sidik Sunaryo, SH., M.Si., M.Hum

Dekan,

Dr. Tongat, SH., M.Hum

Ketua Program Studi,

Nu'man Aunuh, SH., M.Hum

KEBIJAKAN HUKUM PIDANA SANKSI KEBIRI KIMIA DITINJAU DARI TUJUAN PEMIDANAAN DAN PERSPEKTIF HAM

Tri Ageng Alifi

Program Studi Hukum
Fakultas Hukum
Universitas Muhammadiyah Malang
Jl. Raya Tlogomas No. 246 Malang
Email : ageng.alifi@gmail.com

ABSTRAK

Penelitian ini berjudul “**Kebijakan Hukum Pidana Sanksi Kebiri Kimia Ditinjau dari Tujuan Pemidanaan dan Perspektif HAM**”. Penelitian ini bertujuan untuk menjawab pertanyaan: Bagaimana hukuman kebiri bagi pelaku kekerasan seksual terhadap anak ditinjau dari tujuan pemidanaan, dan Bagaimana kebijakan hukuman kebiri bagi pelaku kekerasan seksual terhadap anak dalam perspektif HAM. Penulisan hukum ini tergolong dalam jenis penelitian Normatif. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan konsep dan pendekatan Undang-Undang.

Penelitian ini menemukan bahwa kebiri kimia ditinjau dari tujuan pemidanaan masih belum sepenuhnya sesuai dengan apa yang menjadi konsideran diterbitkannya Perppu No 1 Tahun 2016. Bahwa Indonesia menggunakan teori pemidanaan yang bersifat campuran dari absolut dan relatif yang bersifat integratif dan kebiri kimia tidak sesuai dengan ide dasar dari teori tersebut, serta tidak sesuai dengan ide dasar dari sanksi tindakan yang berorientasi pada perlindungan masyarakat. Secara yuridis sanksi didalam UU Perlindungan Anak belum mampu memberikan efek jera kepada pelaku. Selanjutnya penelitian ini juga menemukan bahwa kebijakan itu bertentangan dengan prinsip-prinsip yang seharusnya dijadikan nilai dalam HAM.

Kata Kunci: Kebijakan Hukum, Kebiri Kimia, Pidana, HAM

**CRIMINAL POLICY OF CHEMICAL SANCTIONS ASSESSED FROM
CRIMINAL OBJECTIVES AND HUMAN RIGHTS PERSPECTIVES**

Tri Ageng Alifi

*Law Study Program
Faculty of Law
University of Muhammadiyah Malang
Jl. Raya Tlogomas No. 246 Malang
Email: ageng.alifi@gmail.com*

ABSTRACT

This research is entitled "The Criminal Law Policy of Chemical Castration in terms of Criminal Purpose and Human Rights Perspective". This study aims to answer the question: How is the castration punishment for perpetrators of sexual violence against children in terms of the purpose of punishment, and How is the castration penalty policy for perpetrators of sexual violence against children from a human rights perspective. This legal writing belongs to the Normative type of research. The approach used is the conceptual approach and approach to the Law.

This study found that chemical castration in terms of the purpose of punishment is still not fully in accordance with what was taken into account in the issuance of Perppu No.1 of 2016. Indonesia uses the theory of punishment which is a mixture of absolute and relative which is integrative and chemical castration is not in accordance with the basic idea of the theory, and is not in accordance with the basic idea of action oriented towards protecting society. Juridically, the sanctions in the Child Protection Law have not been able to provide a deterrent effect on the perpetrators. Furthermore, this research also finds that the policy is contrary to the principles that should be values in human rights

Keywords: *Legal Policy, Chemical Castration, Criminal, Human Rights*

KATA PENGANTAR

Puji syukur atas kehadiran Allah Subhanahu Wata'alla yang telah memberikan rahmat dan karunia-Nya serta junjungan Nabi Muhammad Sallahu'alaihi wassallam, sehingga peneliti dapat menyelesaikan penulisan tugas akhir ini dengan judul **“Kebijakan Hukum Pidana Sanksi Kebiri Kimia Ditinjau dari Tujuan Pemidanaan dan Perspektif HAM”**. Dengan ini penulis sadari karena hanya dengan ridho dan hidayah-Nya semua ini dapat diselesaikan dengan baik.

Dengan ini penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang setulusnya kepada orang – orang yang telah berjasa, serta memberikan bimbingan dan ilmu pengetahuan selama peneliti menempuh pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang, diantaranya yakni :

1. Allah Subhanahu Wata'alla yang telah mengabulkan dan meridhai penulis untuk menyelesaikan penelitian dengan lancar.
2. Terima kasih kepada orang tua tercinta Bapak Fahrur Rozi dan Ibu Sri Undari yang selalu memotivasi dan memberi bantuan baik materiil maupun moril serta bimbingan dan doa selama menuntut ilmu di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang.
3. Dr. Fauzan, M.Pd, selaku Rektor UMM, yang menjadi motivator dan inspiratory penulis selama menimba ilmu di kampus putih tercinta beserta jajarannya.
4. Dr. Tongat, S.H., M.Hum dan Dr. Sidik Sunaryo, SH., M.Si., M.Hum selaku dosen pembimbing Penulis yang telah sabar dan penuh ketulusan dalam memberikan arahan serta pengetahuan baru pada penulis.
5. Dr. Haris, S.H., M.Hum, selaku dosen wali yang selalu mensupport Penulis dalam proses mengerjakan skripsi maupun pada saat proses belajar Penulis di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang;
6. Dr. Tongat, S.H., M.Hum selaku Dekan Fakultas Hukum, Catur Widodo Haruni, S.H., M.Si., M.Hum (Wakil Dekan I), Dr. Haris, S.H., M.Hum

(Wakil Dekan II), Said Noor P, S.H., M.H (Wakil Dekan III), terimakasih telah menjadi motivator Penulis;

7. Seluruh dosen serta para karyawan dan petugas akademik Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang yang tidak bisa saya sebutkan namanya satu persatu;
8. Kepada sahabat penulis Yofan, Renza, Ageng, Dhimas, Ilham, yang selalu menemani dan menghibur penulis saat melakukan penelitian disaat suka maupun duka serta memberi dukungan selama peneliti menyelesaikan tugas akhir serta teman-teman kelas F Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang.
9. Terkhusus orang yang spesial Hidayatul Mustafidah, A.Md.M yang terus mensupport untuk segera menyelesaikan penulisan hukum ini.
10. Dan terakhir, terimakasih untuk semua pihak yang telah membantu baik dalam memberikan support dan dorongan untuk penulis yang namanya tidak dapat disebutkan satu-persatu, Terimakasih.

Disadari bahwa dalam penulisan hukum ini masih banyak kekurangan baik dari segi pembahasan materi dan penulisannya karena keterbatasan pengetahuan dan data yang penulis miliki. Dengan ini peneliti menerima kritik dan saran dari rekan-rekan mahasiswa Fakultas hukum Universitas Muhammadiyah Malang untuk kesempurnaan penelitian hukum ini sehingga hasil penelitian hukum ini dapat dijadikan referensi dalam melakukan penelitian lebih lanjut bagi para akademisi hukum. Semoga penelitian ini mampu memberikan manfaat bagi kita semua dan atas segala kesalahan yang pernah peneliti lakukan, peneliti mohon maaf yang sebesar-besarnya.

Malang, 05 Oktober 2020

Penulis,

DAFTAR ISI

| | |
|--|------|
| LEMBAR PERSETUJUAN | i |
| LEMBAR PENGESAHAN | ii |
| ABSTRAK | iv |
| <i>ABSTRACT</i> | v |
| KATA PENGANTAR..... | vi |
| DAFTAR ISI..... | viii |
| DAFTAR LAMPIRAN | x |
| BAB I..... | 1 |
| PENDAHULUAN..... | 1 |
| A. Latar Belakang | 1 |
| B. Rumusan Masalah | 7 |
| C. Tujuan Penulisan | 8 |
| D. Manfaat Penulisan | 8 |
| E. Metode Penulisan | 9 |
| F. Sistematika Penulisan..... | 10 |
| BAB II | 12 |
| TINJAUAN PUSTAKA..... | 12 |
| A. KEBIJAKAN HUKUM PIDANA..... | 12 |
| 1. Konsep Hukum Pidana..... | 13 |
| 2. Ruang Lingkup Kebijakan Hukum Pidana..... | 16 |
| 3. Tujuan dan Arah Kebijakan Hukum Pidana | 19 |
| 4. Teori-Teori Pemidanaan..... | 23 |
| 5. Dasar Yuridis dan Sosiologis Pembentukan Sanksi Kebiri Kimia | 26 |
| 6. Kebijakan Hukum Pidana dalam Konteks Kebiri Kimia | 31 |

| | |
|---|-----------|
| B. KEBIJAKAN HAK ASASI MANUSIA | 32 |
| 1. Konsep Kebijakan HAM..... | 34 |
| 2. Kebijakan HAM dalam Kebiri Kimia | 40 |
| BAB III..... | 46 |
| HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN | 46 |
| A. SANKSI PIDANA KEBIRI KIMIA BAGI PELAKU KEKERASAN SEKSUAL TERHADAP ANAK DITINJAU DARI TUJUAN PEMIDANAAN. | 46 |
| B. KEBIJAKAN SANKSI PIDANA BAGI PELAKU KEKERASAN SEKSUAL DALAM PERSPEKTIF HAM | 55 |
| BAB IV | 64 |
| PENUTUP..... | 64 |
| A. Kesimpulan..... | 64 |
| B. Saran..... | 65 |
| DAFTAR PUSTAKA..... | 66 |
| LAMPIRAN..... | 69 |

DAFTAR LAMPIRAN

| | |
|--|----|
| Lampiran 1 Surat Tugas | 69 |
| Lampiran 2. Kartu Kendali Bimbingan Tugas Akhir..... | 70 |
| Lampiran 3. Surat Pernyataan Plagiasi | 72 |
| Lampiran 4. Berita Acara Seminar Proposal..... | 73 |
| Lampiran 5. Kartu Peserta Seminar Proposal | 76 |



DAFTAR PUSTAKA

Sumber Buku

- Abdul Wahid and Muhammad Irfan. 2011. *Perlindungan Terhadap Korban Kekerasan Seksual (Advokasi Atas Hak Asasi Perempuan)*. Bandung: Refika Aditama
- Ahadian, Ridwan Indra. 1991. *Hak Asasi Manusia dalam UUD 1945*. Jakarta: CV. Haji Masagung.
- Aruan Sakidjo, Bambang Poernomo. 1990. *Hukum Pidana*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Barda Nawawi Arief. 2014. *Kebijakan Hukum Pidana (Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru)*. Semarang: Prenadamedia Group.
- Barda Nawawi Arief. 2006. *Tindak Pidana Mayantara Perkembangan Kajian Cyber Crime Di Indonesia*. Jakarta: RajaGrafindo Persada. 2006.
- Barda Nawawi Arief. 2015. *Kebijakan formulatif (Ketentuan Pidana Dalam Peraturan Perundang-Undangan)*. Semarang: Pustaka Magister Semarang.
- Dhermawan Oka. 2005. *Perlindungan Aborsi Bagi Perempuan Korban Pemerkosaan*. Jakarta: Bina Bahasa.
- Herman Bianchi dalam Barda Nawawi Arief. 2010. *Kapita Selekta Hukum Pidana*. Cetakan Ke-2. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Mahmud Kusuma. 2009. *Menyelami Semangat Hukum Progresif Terapi Pragmatik Bagi Lemahnya Hukum Indonesia*. Yogyakarta: Antony Lib.
- Maidin Gultom. 2013. *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dan Perempuan* (Bandung: Refika Aditama).
- Marlina. 2011. *Hukum Penitensier*. Bandung: Reflika Aditama.
- Marsudi, Subandi AI.. 2001. *Pancasila dan UUD 45 dalam Paradiqma Reformasi*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.
- Muladi, Barda Nawawi Arief. 2005. *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*. Bandung: Alumni.

- Muladi, Barda Nawawi Arief. 1984. *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*. Bandung. Alumni.
- P.A.F. Lamintang. 1984. *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*. Bandung: Sinar Baru.
- P.A.F. Lamintang. 1984. *Hukum Penitensier Indonesia*. Bandung: Armico.
- Purwadianto, Agus. 2003. *Perkosaan Sebagai Pelanggaran HAM*. Jakarta: Gramedia Utama.
- Ranidar Darwis. 2003. *Pendidikan Hukum dalam Konteks Sosial Budaya bagi Pembinaan Kesadaran Hukum Warga Negara*. Bandung: Departemen Pendidikan Indonesia UPI.
- Sri Santuti hariadi. 2000. "Tindak Perkosaan Terhadap Anak Perempuan" dalam *Anak Rawan : Bunga Rampai Tentang Anak- Anak Yang Membutuhkan Perlindungan Khusus*. cetakan ke-1. Surabaya: Lutfansah Mediatama.
- Suharto, Junaidi Efendi. 2010. *Panduan Praktis Bila Menghadapi Perkara Pidana. Mulai Proses Penyelidikan Sampai Persidangan*. Jakarta: Prestasi Pustaka.
- Utrecht. 1987. *Rangkaian Sari Kuliah Hukum Pidana II*. Surabaya: Pustaka Tinta Mas.
- Wirjono Prodjodikoro. 2003. *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*. Bandung: PT. Refika Aditama. Hal 20.
- Wirjono Prodjodikoro. 1980. *Tindak Tindak Pidana Tertentu Di Indonesia*. Jakarta: P.T Eresco.

Sumber Jurnal

- Sobirin Malian. *Analisis Keunikan Dan "Missing Link" Antara Hukum Pidana Internasional. Etika Profesi. Dan Politik; Telaah Kritis Perppu Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas UU Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. Jurnal Hukum Novelty. Edisi No 2 Vol. 7 (2016). hlm 176.*

Sumber Peraturan dan Putusan

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Perlindungan Anak.

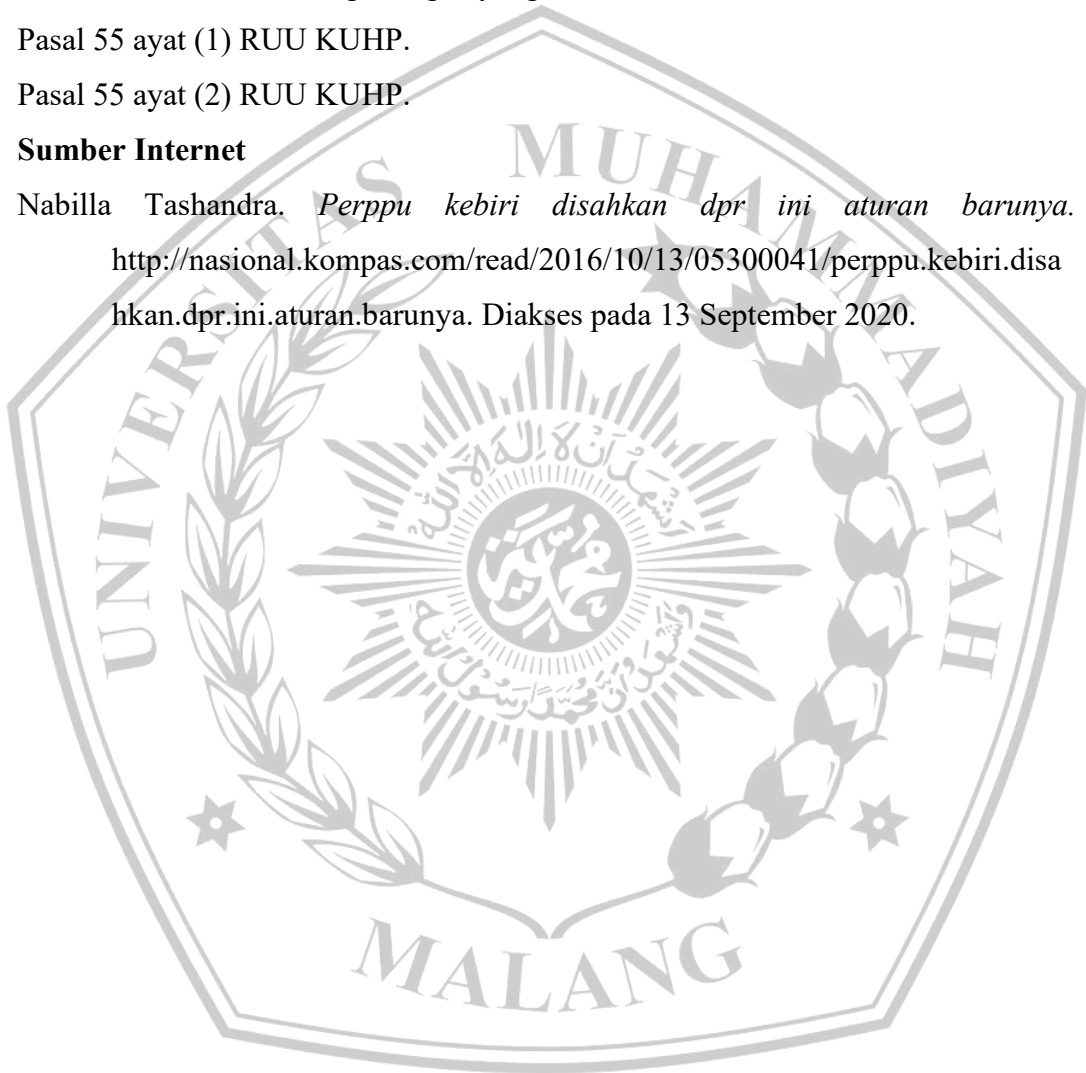
Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 138/PUU-VII/2009 Tentang Parameter Perihal Ikhwal Kegentingan yang Memaksa.

Pasal 55 ayat (1) RUU KUHP.

Pasal 55 ayat (2) RUU KUHP.

Sumber Internet

Nabilla Tashandra. *Perppu kebiri disahkan dpr ini aturan barunya.*
<http://nasional.kompas.com/read/2016/10/13/05300041/perppu.kebiri.disahkan.dpr.ini.aturan.barunya>. Diakses pada 13 September 2020.



Lampiran 3. Surat Pernyataan Plagiasi

SURAT PERNYATAAN PLAGIASI


Saya yang bertanda tangan di bawah ini :


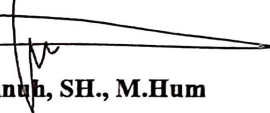
Nama : Nu'man Aunuh, SH., M.Hum
Jabatan : Ka. Prodi Fakultas Hukum
Dengan ini menerangkan, nama tersebut di bawah ini :
Nama : Tri Ageng Alifi
Nim : 201610110311359

Dengan Judul Skripsi ... **Kebijakan Sanksi Pidana Kebiri Kimla Ditinjau dari Tujuan
Pemidanaan dan Perspektif HAM**

Sudah melakukan cek Plagiasi dan Dinyatakan **BEBAS** Plagiasi.

Demikian surat pernyataan ini saya buat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

11/ 20
11 

 **Malang, 10 November 2020**

Nu'man Aunuh, SH., M.Hum

